

---

**GOOD GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KAPABILITAS DIDAERAH  
PERBATASAN KEPULAUAN RIAU**

Rizqi Apriani Putri<sup>1</sup>, Anastasia Wiwik Swastiwi<sup>2</sup>, Kustiawan<sup>3</sup>, Yoriezka Asta Pebriani<sup>4</sup>,  
Savira Felisia<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Prodi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Maritim Raja Ali Haji

E-mail : [Rizqi Apriani Putri](mailto:Rizqi Apriani Putri)<sup>1</sup>, [wiwik2021@umrah.ac.id](mailto:wiwik2021@umrah.ac.id)<sup>2</sup>, [kustiawan@umrah.ac.id](mailto:kustiawan@umrah.ac.id)<sup>3</sup>,  
[yoriskaasta3@gmail.com](mailto:yoriskaasta3@gmail.com)<sup>4</sup>, [savirafelisia@gmail.com](mailto:savirafelisia@gmail.com)<sup>5</sup>

---

**ABSTRACT**

*The development of border areas is a priority scale of the Indonesian government. Based on geographical location, Indonesia, which is mostly surrounded by waters, makes border areas the leading area to maintain the integrity of the country. The management of the state border area is a strategic issue that must be carried out to strengthen the integrity of the two regions of the Republic of Indonesia. Riau Islands Province as an area directly adjacent to neighboring countries. Natuna Regency is one of the regions in Riau Islands. Based on geographical location, the Natuna region has strategic value in optimizing the potential of maritime border areas in the Riau Islands. Various stakeholders completed so that the guard in the border area in Natuna can be improved. One of the priority programs of the Regional and Central Government is the construction of the Acceleration of the Development of 11 State Cross Border Posts and Supporting Infrastructure Facilities in Border Areas according to President (Inpres) Number 1 of 2019. In this text, using a qualitative method, namely literature study, discusses strengthening the capability of stakeholders to protect the maritime border area in Serasan, Natuna. The idea of this text is the need to strengthen stakeholders to achieve good governance so that border areas also get protection, security for all countries including rural and remote areas on the border. The construction of Serasan PLBN is designed to become a new economic growth center in the 3T (frontier, outermost and underdeveloped) regions.*

**Keywords:** *Border, PLBN, Good Governance, Maritime Governance*

**ABSTRAK**

Pengembangan wilayah perbatasan menjadi skala prioritas dari pemerintah Indonesia. Berdasarkan letak geografis, Indonesia yang mayoritas dikelilingi oleh perairan menjadikan wilayah-wilayah perbatasan sebagai garda terdepan untuk menjaga keutuhan Negara. Persoalan wilayah batas negara menjadi isu strategis yang harus dilakukan penguatan integritas kedaulatan wilayah NKRI. Provinsi Kepulauan Riau sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Kabupaten Natuna merupakan salah satu daerah di Kepulauan Riau. Berdasarkan letak geografis, wilayah Natuna memiliki nilai strategis dalam optimalisasi potensi wilayah perbatasan maritime di Kepulauan Riau. Berbagai stakeholders merampungkan agar penjagaan di wilayah perbatasan di Natuna dapat ditingkatkan. Salah satu program prioritas Pemerintah Daerah dan Pusat yaitu dengan dibangunnya Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan sesuai Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019. Dalam naskah ini, menggunakan

---

metode kualitatif yaitu studi literatur, membahas penguatan kapabilitas stakeholders untuk menjaga wilayah perbatasan maritime di Serasan, Natuna. Gagasan naskah ini, perlunya penguatan stakeholders untuk mencapai good governance agar daerah perbatasan juga mendapatkan perlindungan, keamanan bagi semua negara termasuk di pedesaan dan daerah terpencil di perbatasan. Pembangunan PLBN Serasan ini dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

**Kata Kunci:** Perbatasan, PLBN, Good Governance, Tata Kelola Maritime

---

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara kepulauan yang mayoritas dikelilingi oleh lautan. Negara kepulauan memiliki garis perbatasan yang cukup panjang baik darat, laut ataupun dengan negara tetangga (*state borders*) yang memisahkan kedaulatan suatu negara berdasarkan hukum Internasional. Wilayah ini dapat meliputi dari berbagai negara bagian yang terbentang sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis meliputi kemandirian, ekonomi, pertahanan, social dan lain sebagainya. Optimalisasi yang dapat dilakukan dari potensi wilayah perbatasan ini, masyarakat harus semakin sadar akan keberadaan wilayah perbatasan ini sebagai garda terdepan kedaulatan negara serta akan dikelola dengan baik. Pembangunan wilayah perbatasan juga menjadi prioritas untuk menjaga keutuhan negara berdasarkan implementasi poin ketiga dari nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat wilayah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nur Salsabila et al., 2021; Setyaningrum, 2019). Berbagai stakeholder yang terkait dalam perbatasan ataupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya yang akan dilakukan untuk membangun wilayah perbatasan maritime ini. Penguatan wilayah perbatasan, agar masyarakat melaraskan perhatian dari pemerintah dan merasakan

perlindungan yang diberikan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari keamanan maritime di wilayah pedesaan dan daerah terpencil terkhusus di wilayah perbatasan dengan negara lainnya.(Setyaningrum, 2019).

Posisi geografis suatu wilayah yang terletak antara dua benua dan dua samudera menghasilkan sebuah kawasan yang strategis untuk lalu lintas pelayaran nasional ataupun internasional. Isu keamanan di Laut Utara yang dahulu dikenal dengan nama Laut China Selatan akhir-akhir ini mendapat perhatian serius, terutama di kawasan Asia Tenggara, bahkan Amerika ikut campur karena Laut Utara merupakan kawasan dengan sektor ekonomi, politik, dan keamanan yang baik. Sehingga negara China dapat mengklaim berdasarkan sejarah masa lalu bahwa Laut Utara/Laut China Selatan adalah wilayah China, maka untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan operasi keamanan yang dapat menjadi ancaman maritime bagi wilayah perbatasan. Selain itu, Laut Natuna merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai dan sibuk, dengan kapal-kapal dagang yang berlayar di Selat Singapura melalui Laut Natuna menuju Benua Eropa. Letak geografis Laut Natuna berbatasan dengan negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Vietnam, sehingga rentan terhadap kejahatan seperti

illegal fishing dan human trafficking. (Hadi Nugroho et al., 2020).

Isu wilayah perbatasan negara telah menjadi salah satu isu kebijakan pertahanan di tingkat nasional dan bilateral, dan kini telah menjadi isu multilateral internasional. Masalah ini muncul karena perkembangan ekonomi, politik dan teknologi, perkembangan globalisasi negara dan kepentingan negara perbatasan. (Fibrianto et al., 2022). Pengelolaan perbatasan Indonesia dihadapkan pada dua isu strategis, yaitu pengelolaan perbatasan negara dan pengelolaan perbatasan. Pembangunan yang belum optimal, pemanfaatan potensi dan kurangnya pelayanan/infrastruktur dasar di kawasan perbatasan merupakan persoalan umum yang ada dan terjadi hampir di seluruh kawasan perbatasan wilayah Indonesia. Akibatnya daerah perbatasan selalu tertinggal dan terisolir, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah, dan aksesibilitas kurang, terutama akses ke daerah perbatasan pusat pemerintahan, hingga pusat pelayanan publik. (Firdaus, 2018).

Di tempat-tempat tertentu di sepanjang perbatasan, terdapat lalu lintas tradisional antara warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Sehingga, diperlukan adanya Pos Lintas Batas berfungsi untuk layanan kepada setiap orang dan barang yang melintasi keluar atau masuk wilayah perbatasan nasional guna menjaga kedaulatan negara Indonesia. (Maisondra, 2019; Setyaningrum, 2019). Pentingnya penguatan dalam pembangunan Pos Lintas Batas Negara diharapkan infrastruktur yang massif akan memberikan peningkatan jumlah wisatawan baru ataupun perdagangan sehingga mendongkrok perekonomian terkhusus di

Serasan, Natuna. Hal ini merupakan wujud dari program pemerintah membangun daerah 3T sebagai garda terdepan NKRI dan menjadi teras depan kebanggaan Indonesia. (Setyaningrum, 2019). Pembangunan Pos Lintas Bats Negara Serasan berdasarkan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan yang dibangun di Kabupaten Natuna akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). PLBN Serasan dirancang sebagai kategori PLBN laut sehingga diakses melalui perairan.

Berbagai upaya stakeholder meningkatkan kapabilitas kemaritiman dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan kawasan perbatasan yang berorientasi *outworking looking* atau pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Terbentuknya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan salah satu usaha yang dilakukan pemerintah guna percepatan penyelesaian dan pengembangan di wilayah perbatasan merupakan Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Eksistensi yang dilakukan BNPP Pusat memberikan kewenangan ke daerah melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau karena daerah ini dilalui jalur perdagangan Internasional. Visi dari BNPP maupun BPPD ini sama yaitu mewujudkan tata kelola batas negara dan kawasan perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi

serta menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan latar belakang diatas, maka naskah ini bertujuan untuk melihat penguatan kapabilitas stakeholder dalam menjaga wilayah perbatasan maritime di Serasan, Natuna. Selain itu, adanya pembangunan PLBN Serasan diharapkan dapat mendukung infrastruktur kedaulatan perbatasan negara dari ancaman serta peningkatan sector social dan ekonomi bagi masyarakat perbatasan Serasan, Natuna.(Firdaus, 2018; Yudha & Resa Ana Dina, 2020).

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam naskah ini yaitu deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh berbagai informasi terkait penguatan wilayah perbatasan melalui pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Di Serasan, Natuna sebagai garda terdepan NKRI. Penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena, peristiwa, persepsi, aktivitas social secara individu ataupun kelompok. Peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena untuk menungkap permasalahan konsepsi dengan mewujudkan pengamanan wilayah perbatasan. Data yang dipakai dalam naskah ini, berupa data sekunder seperti jurnal, arsip, buku dan lainnya yang berkaitan terhadap penelitian ini. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab fenomena yang diteliti hingga mendapatkan kesimpulan tentang penguatan kapabilitas stakeholders untuk menjaga wilayah perbatasan maritime di Serasan, Natuna.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengembangan Kawasan Perbatasan Negara**

Pengembangan kawasan perbatasan negara merupakan bagian penting dari perencanaan jangka menengah nasional dalam rangka penguatan keutuhan dan kedaulatan wilayah serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan batas negara Indonesia didasarkan pada prinsip membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kabupaten Natuna terletak di provinsi Kepulauan Riau, salah satu pulau paling terpencil di Indonesia bagian utara. Peran strategis Kabupaten Natuna adalah menjadi pintu gerbang perdagangan dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Singapura. Kawasan Natuna memiliki nilai strategis dari segi ekonomi, politik, dan militer. Hal ini sangat masuk akal karena Natuna secara geografis termasuk dalam wilayah perbatasan Laut Cina Selatan, yang merupakan wilayah dengan berbagai landmark dan potensi sumber daya alam yang dimiliki. Secara historis, Natuna dikenal sebagai daerah yang memiliki terkait penyelundupan (obat-obatan terlarang, senjata serta manusia), pembajakan laut, pencurian sumber daya alam dan separatisme. Dari berbagai permasalahan dari history Natuna ini akan bisa menjadi ancaman kedaulatan bangsa hingga terganggunya keamanan di wilayah perbatasan. Persoalan ini dapat disikapi dari penguatan kapabilitas dari berbagai instrumen perencanaan dalam hal ini yaitu stakeholder agar terintegrasi dan komprehensif. Tujuan pembangunan perbatasan adalah untuk meningkatkan taraf hidup, berkembang secara berkelanjutan dan harmonis, serta menghilangkan hambatan

pembangunan perbatasan. (Finambello & Suprojo, 2019; Yudha & Resa Ana Dina, 2020).

Pembangunan pos perbatasan negara dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan, karena pembangunan pos perbatasan negara dikatakan bermanfaat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan dan meningkatkan persaingan harga. Daya saing dan mobilitas perekonomian nasional, karena dengan tumbuhnya perekonomian merupakan pemerataan pendapatan. Dengan memperkecil jumlah masyarakat dan kesenjangan sosial untuk mencapai kesejahteraan, tentunya pembangunan Pos Lintas batas Negara (PLBN) harus mampu meningkatkan perekonomian daerah. Pertumbuhan sebagai salah satu cara untuk mendongkrak perekonomian, namun nyatanya manfaat pembangunan pos perbatasan pemerintah di masyarakat belum sepenuhnya diapresiasi karena hanya mendukung bisnis dan ritel. (Finambello & Suprojo, 2019; Hariyatie, 2015).

Provinsi Kepulauan Riau yang berada di garis depan NKRI membutuhkan sarana infrastruktur yang memadai di perbatasan. Untuk menarik perhatian terhadap pembangunan di perbatasan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang membangun Kantor Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna. PLBN Serasan menjadi saksi hadirnya negara di daerah perbatasan, daerah paling terpencil seperti Natuna sangat membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah untuk menjaga kedaulatan

negara. Pembangunan PLBN di Serasan bertujuan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah 3T (Daerah Perbatasan, Terluar, dan Tertinggal) serta melaksanakan amanat Inpres No. 1 Tahun 2019, yaitu percepatan pembangunan. Prioritas 11 Pos lintas batas terpadu dan infrastruktur pendukung di kawasan perbatasan di Indonesia (Nurmandi et al., 2012).

Realisasi PLBN Serasan akan memberikan nilai strategis bagi garda terdepan Indonesia. Berbatasan langsung dengan negara lain dibagian utara dengan Vietnam dan Kamboja, sedangkan Malaysia dan Singapura di sebelah barat dan timur. Implementasi dari program pembangunan PLBN ini agar penguatan di wilayah perbatasan maritime memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing, serta memaksimalkan potensi kemaritiman yang berdaulat dan aman di Kepulauan Riau. Fasilitas Serasan PLBN memiliki nilai strategis sebagai teras depan utama Indonesia, berada tepat di utara Vietnam dan Kamboja serta berbatasan dengan Singapura dan Malaysia di barat dan timur. Tujuan pengembangan ruang perbatasan ini adalah untuk mewujudkan halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing dan aman. Dengan PLBN Serasan, potensi maritim Kepulauan Riau bisa kita maksimalkan. (Kepriprov, 2022).



**Gambar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan, Natuna (Proses Pembangunan)**



**Gambar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Serasan, Natuna**



**Gambar PLBN Serasan, Natuna**

PLBN Serasan dibangun dengan tujuan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah terjauh dan desa yang menyebarkan pembangunan secara merata di seluruh wilayah. PLBN Serasan merupakan salah satu nilai strategis nasional karena berbatasan langsung dengan negara Vietnam, Kamboja, Singapura dan Malaysia

dan melewati Laut China Selatan yang mana merupakan jalur perlintasan perdagangan dunia. PLBN Serasan dibangun di Pelabuhan Serasan di Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan. Luas PLBN Serasan 10.870 meter persegi. Pembangunan PLBN Terpadu Serasan dimulai pada 5 November 2020. Infrastruktur pendukung dalam pembanguana ini dibangun juga gedung administrasi, menara air, tempat cuci mobil, 4 gedung perkantoran, gardu jaga, gardu listrik, TPA, air rumah pompa dan bangunan luar lainnya. Total nilai konstruksi PLBN Serasan adalah Rp 145,69 miliar yang berasal dari APBN (MYC) 2020-2022. PLBN Serasan nantinya bisa membuka lapangan ekspor hasil laut dan produk berharga lainnya dari Provinsi Kepulauan Riau. Kepulauan Riau berdasarkan letak geografis yang luas permukaan airnya mencapai 96 persen sangat bergantung pada hasil laut. Sehingga, potensi yang dimiliki daerah perbatasan dapat dimaksimalkan untuk mendukung penguatan kapabilitas kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau. (Kepriprov, 2022).

### **Mewujudkan Good Governance di Wilayah Perbatasan Melalui Pembangunan PLBN di Serasan, Natuna**

Pelaksanaan good governance di wilayah perbatasan salah satunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mengemukakan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) meliputi lautan yang didalamnya melingkupi pulau-pulau yang tidak terpisah satu sama lainnya. Lausnya wilayah strategis maritime di Indonesiamenyimpan

potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga perlu adanya prioritas dalam pengeloalaannya dan perlindungannya serta menjaga kedaulatan negara. Permasalahan yang ada di wilayah perbatasan rentan terhadap praktik kejahatan trans border seperti kejahatan lintas negara, penyelundupan obat-obat terlarang, pembajakan, penangkapan ikan secara illegal, perdagangan masuniah, teroris hingga masuknya imigran gelap. Konflik social budaya yang terjadi dierbatasan mencerminkan lemahkan pengeloaaan perbatasan karena kurangnya koordinasi antar Lembaga negara (stakeholder)(Fitra Yuza & Deliarnoor, 2017; Wong Villanueva et al., 2020). Salah satu permasalahan perbatasan wilayah di Indonesia yang belum selesai terdapat di Laut Cina Selatan, Pulau Natuna yang mendiami wilayah tersebut rentan terhadap berbagai konflik yang akan terjadi di masa saat ini ataupun akan datang. Maka, diperlukan koordinasi antar Lembaga pemerintah, swasta, masyarakat hingga bebragai stakeholder yang terkait untuk menagtasi permasalahan sehingga dapat diterapkan good governance.(Fibrianto et al., 2022).

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah ini diberikan seluas-luasnya kepada daerah kecuali 6 urusan ini, politik luar negeri, pertahanan, kemanan, yustisi, meneter dan agama. Dikarenakan urusan tersebut merupakan mutlak dibawah

kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah juga emmberikan kewenangan kepada pemerintah daerah melalui prinsip desentralisasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan dasar UU tersebut, pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri serta turut serta dalam menjaga keamanan laut terkhusus di wilayah perbatasan.

Keberadaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu stakeholder yang menangani permasalahan pengelolaan perbatasan dan pulau terluar di Kepulauan Riau. Adapaun visi dari Badan ini seusai dengan misi ke-5 Gubernur Kepulauan Riau, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur antar pulau dalam pengintegrasian dan percepatan pembangunan di kawasan pesisir. Implementasi dari misi ini, BPPD menyusun grand design untuk pembangunan dan pengelolaan wilayah perbatasan, salah satunya yaitu membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Serasan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengimpangan pendekatan berbagai stakeholder untuk ikut terlibat ataupun kerjasama dalam pengeloalan di kawasan perbatasan guna mengoptimalkan fungsi PLBN Serasan dari berbagai hambatan isu keamanan maritime yang akan terjadi di masa depan.

Terkhusus yang berkaitan dengan anatar lembaga (stakeholder) maka diperlukan model kelembagaan pengelolaan perbatasan yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mencangkup semua aspek. Konsep *Coordinated and Integrated*

*Border Management/CIBM* dapat diterapkan dalam penguatan kapabilitas perbatasan di PLBN Serasan karena sangat relevan dengan persoalan-persoalan dari pengelolaan perbatasan di Natuna. Karena, konsep ini sangat relevan dengan berbagai persoalan-persoalan pengelolaan perbatasan di Serasan, Natuna. IBM memiliki dua dimensi yang berbeda, yaitu sistem pengelolaan nasional dan sistem pengelolaan internasional. Sistem pengelolaan nasional melibatkan koordinasi antara pemimpin politik (otoritas yang berbeda di setiap tingkat pemerintahan) dan pemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat nasional, sedangkan sistem pengelolaan internasional memerlukan kerja sama dengan negara tetangga dan pemangku kepentingan nasional. Kedua sistem pengelolaan tersebut harus diintegrasikan ke dalam satu badan khusus yang ada baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menjadi sebuah *good governance* dalam tata kelola kemaritiman di wilayah perbatasan. Untuk pengendalian perbatasan di Natuna, lembaga tersebut antara lain Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di tingkat pusat dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) di tingkat provinsi, serta lembaga pengamanan perbatasan yang dibentuk di negara bagian. Kerjasama yang akan dijalankan setelah diterapkan PLBN Serasan ini harus bergantung terhadap hukum yang ada yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dari kedua belah pihak yang akan melakukan kerjasama. (Bangun, 2014)

Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola

sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya yang meliputi ikut serta dalam memelihara keamanan laut. Kewenangan tersebut dapat dikolaborasikan dalam ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Extended ASEAN Maritime Forum (EAMF), khususnya dalam program keselamatan maritim (SAR dan teknologi perkapalan), dan perlindungan lingkungan laut (sampah plastik laut, pelestarian lingkungan laut dan pesisir, tumpahan minyak di laut). Namun dalam lingkup kewenangannya, pemerintah daerah provinsi dapat mengatur sumber daya alam di laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Keberadaan PLBN Serasan, dan PLBN Laut lainnya, tentunya akan menghadapi kompleksitas keamanan maritim dalam kerangka keterlibatan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, dengan adanya pengimbangan pendekatan pertahanan-keamanan dalam pengelolaan perbatasan, penting digesa kerja sama ASEAN dalam keamanan maritim. Hal ini dapat ditempuh dengan pelibatan Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia yang merupakan amanat dari ASEAN Charter. Jika tidak membangun kerja sama yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di kawasan perbatasan, maka akan sulit mengoptimalkan fungsi PLBN Serasan, karena akan terhambat berbagai isu keamanan maritim.

## **KESIMPULAN**

Kabupaten Natuna adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Natuna memiliki nilai strategis karena

berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia dan Singapura hingga berada di Laut China Selatan (LCS). Nilai strategis yang dimiliki Natuna menjadikan wilayah ini sebagai garda terdepan dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Serasan, Natuna merupakan sebagai perlindungan dari pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melindungi dan menjaga kapabilitas dari keamanan maritim di Indonesia terkhusus di Kepulauan Riau. Penguatan kapabilitas perbatasan maritime di Serasan, Natuna ini harus didukung dengan adanya kolaborasi dari berbagai stakeholder agar terciptanya *good governance* dalam tata kelola maritime perbatasan di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Pengembangan PLBN ini sebagai gerbang masuk Internasional di berbagai sektor perdagangan, social, hingga pariwisata agar mendukung daya saing daerah perbatasan. Peningkatan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan negara di Kabupaten Natuna akan memudahkan kolaborasi antar wilayah-wilayah baik nasional ataupun Internasional antar negara tetangga. Serta dapat menerapkan konsep *Coordinated and Integrated Border Management/CIBM* dalam pengelolaan perbatasan di PLBN Serasan, Natuna karena berkolaborasi dengan berbagai stakeholder yang terkait.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, B. H. (2014). MEMBANGUN MODEL KERJASAMA PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA DI KALIMANTAN BARAT-SARAWAK (Suatu Studi Perbandingan). *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 43(1).
- Fibrianto, E., Hidayat, T., Darmawan, W. B., & Djuyandi, Y. (2022). Interoperabilitas TNI Dengan Lembaga Negara Lainnya Dalam Mewujudkan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara (Studi Kasus di Laut Natuna Utara). *Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 1(2), 119–127. <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39582>
- Finambello, F., & Suprojo, A. (2019). ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN POS LINTAS BATAS NEGARA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT PERBATASAN. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2). [www.publikasi.unitri.ac.id](http://www.publikasi.unitri.ac.id)
- Firdaus, F. (2018). Dampak kebijakan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk di Desa Sebunga Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat | Firdaus | JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. *JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 3(2). <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3881>
- Fitra Yuza, A., & Deliarnoor, N. A. (2017). The Governance Of Border Areas' Determination In Riau Province. *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)*.
- Hadi Nugroho, S., Sukandari, B., Bandono, A., & Sri Suharyo, O. (2020). The

- Applications Of Model Bayesian Networks For Analysis And Preventive Actions On Maritime Security Operations. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 9(3). [www.ijstr.org](http://www.ijstr.org)
- Hariyatie, N. (2015). Kerjasama Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Daerah Kalimantan (Border Regional Cooperation and Regional Development in Kalimantan). *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 20(2).  
<http://jurnafis.untan.ac.id/index.php/Proyeksi>
- Kepriprov. (2022). *PLBN Serasan Bukti Kehadiran Negara di Perbatasan*. <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/plbn-serasan-bukti-kehadiran-negara-di-perbatasan>
- Maisondra, M. (2019). STRATEGI DAN DAMPAK PEMBANGUNAN KAWASAN PLBN ENTIKONG DALAM MENINGKATKAN PERDAGANGAN DAN KEAMANAN WILAYAH INDONESIA. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 4(2).
- Nur Salsabila, M. D., Puspita, I. A., & Widyasthana, S. (2021). The Project Performance Evaluation of PLBN Project Using Earned Value Management Method. *International Journal of Innovation in Enterprise System*, 6(01), 61–73.  
<https://doi.org/10.25124/ijies.v6i01.139>
- Nurmandi, A., Trisno Aji Putra, & Nikolas Panama. (2012). *Menjaga Indonesia dari Kepri: peluang, tantangan & profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau*. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepri.
- Setyaningrum, M. H. (2019). Simple Risk Analysis Of PLBN Entikong Development, West Kalimantan. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH*, 8, 8. [www.ijstr.org](http://www.ijstr.org)
- Wong Villanueva, J. L., Kidokoro, T., & Seta, F. (2020). Cross-Border Integration, Cooperation and Governance: A Systems Approach for Evaluating “Good” Governance in Cross-Border Regions. *Https://Doi.Org/10.1080/08865655.2020.1855227*, 37(5), 1047–1070.  
<https://doi.org/10.1080/08865655.2020.1855227>
- Yudha, E. P., & Resa Ana Dina. (2020). Pengembangan Potensi Wilayah Kawasan Perbatasan Negara Indonesia (Studi Kasus: Ranai-Natuna). *Tata Loka*, 22(3).  
<https://doi.org/10.14710/tataloka.22.3.366-378>